

**FUNGSI LEGISLASI DPRD KABUPATEN LAMONGAN
DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH INISIATIF TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI TAHUN 2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos)
dalam bidang Ilmu Politik



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Megafitria Farida Aisha

10040121088

Program Studi Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maret, 2025

PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim. yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Megafitria Farida Aisha

NIM : 10040121088

Program Studi : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lamongan dalam
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani Tahun 2024

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

- 1) Skripsi ini tidak dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti sebagai karya plagiat, maka saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang berlaku.

Surabaya, 24 Februari 2025



Yang Menyatakan

Megafitria Farida Aisha

NIM. 10040121088

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Setelah melakukan bimbingan proposal skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Megafitria Farida Aisha

NIM : 10040121088

Program Studi : Ilmu Politik

Berjudul *Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lamongan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tahun 2024*, saya berpendapat bahwa proposal skripsi tersebut dapat diajukan agar mahasiswa yang bersangkutan memperoleh izin untuk melanjutkan ke tahap penelitian Skripsi.

Surabaya, 24 Februari 2025

Dosen Pembimbing,



M. Zimamul Khaq, M.Si

NIP. 198212022015031002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi oleh Megafitria Farida Aisha dengan judul *Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lamongan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Tahun 2024*, telah dipertahankan dan dinyatakan lulus oleh Tim Penguji Skripsi pada 5 Maret 2025

Tim Penguji Skripsi

Dosen Pembimbing



M. Zimamul Khaq, M.Si

NIP. 198212022015031002

Dosen Penguji 1



Holilah, S.Ag., M.Si

NIP. 197610182008012008

Dosen Penguji 2



Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si

NIP. 197803152003121004

Dosen Penguji 3



Ajeng Widya Prakasita, M.A

NIP. 199502232020122025

Surabaya, 5 Maret 2024

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan



Prof. DR. H. Abd. Chalik, M.Ag

NIP. 197306272000031002



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MEGAFITRIA FARIDA AISHA
NIM : 10040121088
Fakultas/Jurusan : FISIP / ILMU POLITIK
E-mail address : megafitriafarida@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF TENTANG PERLUNDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Mei 2025

Penulis

(MEGAFITRIA F.A)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini bermula dari ketertarikan peneliti terhadap fenomena pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan melalui penyusunan Peraturan Daerah. Fokus penelitian dalam penelitian ini ialah bagaimana peran anggota Badan Legislasi Kabupaten Lamongan dalam mengawal petani Lamongan melalui Raperda Inisiatif Perlindungan dan Pemberdayaan Petani? serta bagaimana tantangan yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengawasi monopoli pasar? Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan Raperda Inisiatif tentang perlindungan dan pemberdayaan petani Kabupaten Lamongan Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan berupa observasi, wawancara mendalam, beserta kajian dokumentasi. Menggunakan teori Politik Legislasi oleh Jimly Assidique yang menyebutkan bahwa legislasi merupakan kekuasaan yang digunakan untuk dapat melakukan pembentukan peraturan undang-undang.

Hasil penelitian sebagai berikut: pertama peran anggota Badan Legislasi Kabupaten Lamongan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berjalan dengan baik dan optimal. Melalui Pembentukan Ranperda Inisiatif, DPRD telah memenuhi tugasnya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Alur dari pembentukan Ranperda Inisiatif ialah mulanya berasal dari masyarakat. Masyarakat yang memiliki keluhan kesah berhak mengajukan keluhannya kepada para anggota Dewan. Anggota Dewan berkewajiban menampung keluhan masyarakat, membahasnya, dan membentuk regulasi hukum. Badan Legislasi dalam pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif berperan sebagai inisiator, pengambil keputusan, serta persetujuan Peraturan daerah berdasarkan masukan dari petani yang dirugikan oleh tengkulak. Kedua, tantangan yang diperoleh anggota Badan Legislasi saat melakukan pengawasan terhadap monopoli pasar, berupa adanya penyelesaian masalah cenderung tidak efisien karena terhalang oleh waktu.

Kata Kunci: DPRD, Fungsi Legislasi, Peraturan Daerah

ABSTRACT

This research began from the researcher's interest in the phenomenon of legislative function implementation carried out by the Regional People's Representative Council of Lamongan Regency through the drafting of Regional Regulations. The focus of this research is on the role of the members of the Lamongan District Legislative Body in overseeing Lamongan farmers through the Draft Regional Regulation on the Initiative for the Protection and Empowerment of Farmers. And what challenges are faced by the Regional House of Representatives of Lamongan Regency in monitoring market monopolies? The purpose of this research is to understand the application of the legislative function of the Regional People's Representative Council in preparing the Initiative Draft Regional Regulation on the protection and empowerment of farmers in Lamongan Regency in 2024. This research uses a descriptive qualitative research method. The data collection techniques used include observation, in-depth interviews, and document review. The Legislative Politics theory by Jimly Assidique, states that legislation is the power used to create laws.

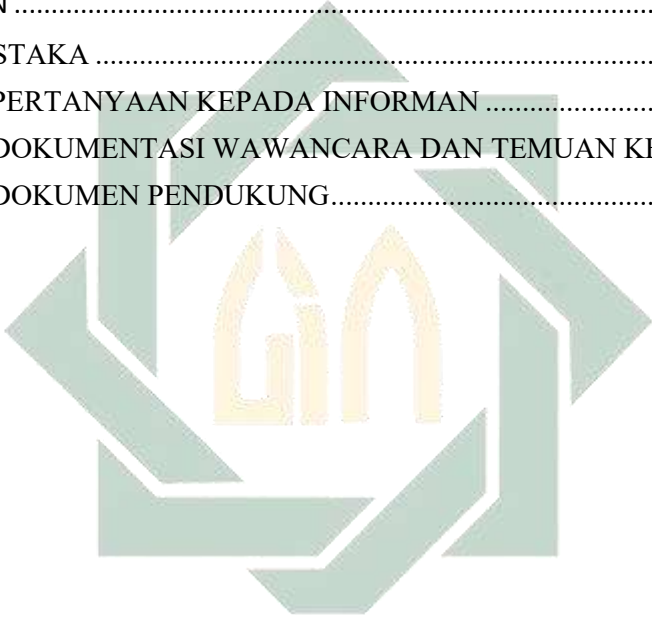
The research results are as follows: First, the role of the members of the Lamongan Regency Legislative Body in the preparation of the Regional Regulation Draft on the Protection and Empowerment of Farmers is running well and optimally. Through the Formation of the Initiative Draft Regional Regulation, the Regional People's Representative Council (DPRD) has fulfilled its duty as a representative institution of the people. The process of forming the Initiative Regional Regulation initially comes from the community. The community with grievances has the right to submit their complaints to the members of the Council. Members of the Council are obligated to accommodate public complaints, discuss them, and formulate legal regulations. The Legislatives in forming Initiative Regional Regulations acts as an initiator, decision maker, and approval of regional regulations based on input from farmers who are harmed by middlemen. Second, the challenge faced by members of the Legislative Body when monitoring market monopolies is that problem-solving tends to be inefficient due to time constraints..

Keywords: *DPRD, Legislative Functions, Local Regulation*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka	14
F. Sistematika Penulisan Skripsi	25
BAB II PERSPEKTIF TEORITIS DAN ARGUMENTASI UTAMA.....	28
A. Teori	28
B. Landasan Konsep	32
C. Argumentasi Utama.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Jenis dan Problema Penelitian	39
B. Unit dan Peringkat Analisis	40
C. Situasi Sosial, Sampel, dan Teknik Sampling.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	46
F. Teknik Validasi Data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Setting Penelitian	49
1. Profil Kabupaten Lamongan	49
2. Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.....	51

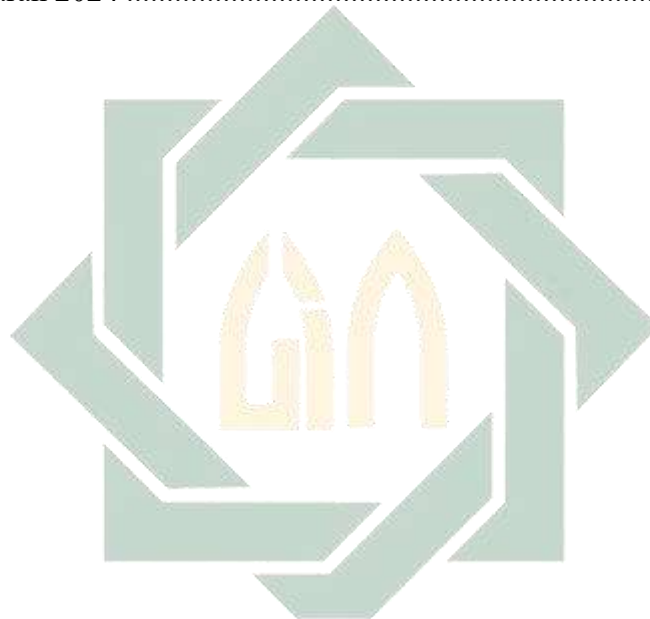
3. Kondisi Pertanian Pasca Monopoli Pasar dan Pengurangan Subsidi Pupuk....	68
B. Hasil Data	70
1. Peran anggota Badan Legislatif dalam mengawal petani Lamongan melalui Raperda inisiatif Perlindungan dan Pemberdayaan Petani khususnya dalam menanggapi monopoli pasar	70
2. Tantangan yang dihadapi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada saat mengawasi monopoli pasar	91
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. SARAN	96
DAFTAR PUSTAKA	xiv
LAMPIRAN PERTANYAAN KEPADA INFORMAN	xvii
LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA DAN TEMUAN KEGIATAN	xix
LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG.....	xxi



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Nama Informan	42
Tabel 1. 2 Daftar Anggota DPRD Kab. Lamongan Masa Jabatan Tahun 2019-2024 beserta Partai Asal	52
Tabel 1. 3 Susunan Pimpinan DPRD Kab. Lamongan Beserta Jabatan.....	54
Tabel 1. 4 Daftar Nama Anggota Dewan Beserta Komisi.....	58
Tabel 1. 5 Susunan Anggota Badan Musyawarah Kabupaten Lamongan Tahun 2024	60
Tabel 1. 6 Susunan Keanggotaan Sekretariat Dewan DPRD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024	66



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Posisi Kabupaten Lamongan di Jawa Timur	50
Gambar 1. 2 Peta Sebaran Kecamatan di Kabupaten Lamongan.....	51
Gambar 1. 3 Rapat Bapemperda dalam Pembahasan Ranperda Inisiatif Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	75
Gambar 1. 4 Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Inisiatif Tahun 2024.....	80
Gambar 1. 5 Laman JDIH Berisi Tentang Finalisasi Rancangan.....	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Anufia, Budur, and Thalha Alhamid. "Instrumen Pengumpulan Data." *American Journal of Maternal Child Nursing* 28, no. 2 (2019): 93–101. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2024*. Vol. 41, 2024. <https://lamongankab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/6efa0e24a035331a046766a0/kabupaten-lamongan-dalam-angka-2024.html>.
- Dachi, Tomas. "Evaluasi Implementasi Peraturan Daerah Sebagai Sebuah Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Fungsi Legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara." *Jurnal Prointegrita* 6, no. 3 (2022): 32–46. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2428>.
- Drs S Bambang Setyadi, M.Si. "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan* 2, no. 3 (2013): 97–103.
- Elyta, Elyta, Syarif Usmulyadi, and Syarif Redha Fachmi Al Qadrie. "Implementation Of Legislation Functions In The Process Of Making Regional Regulations Initiative Of Regional People's Representative Council Of Singkawang City." *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science* 2, no. 01 (November 21, 2023): 121–31. <https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i01.377>.
- Galuh Sekar Wijayanti, Monica, and Retno Saraswati. "PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH." *DIPONEGORO LAW REVIEW* 5, no. 2 (2016): 1–17. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11113>.
- Heriyanto. "Penguatan Dan Optimalisasi Fungsi Lembaga Legislatif Di Daerah." *Jurnal Administrasi Negara* 1, no. 4 (2023): 250–58.
- Herwastoeti. "Konsep Desentralisasi Fiskal Terhadap Otonomi Daerah." *HUMANITY* 5, no. 2 (2010): 100–108.
- Ibrahim, Anis. "Analisis Normatif Pengaturan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Legislasi Peraturan Daerah." *Widya Yuridika Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 13. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.946>.
- Laia, Sri Wahyuni, and Sodialman Daliwu. "Urgensi Landasan Filosofis, Sosiologis, Dan Yuridis Dalam Pembentukan Undang-Undang Yang Bersifat Demokratis Di Indonesia." *Jurnal Education and Development* 10, no. 1 (2022): 546–52.

- Lamongan, Peraturan Bupati. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan (2020).
- Likuajang, Rafli, Itje Pangkey, and Goinpeace Tumbel. "Implementation of Functions Legislation Council of Representatives of the Regional Provincial North Sulawesi Year 2016-2018." *Technium Social Sciences Journal* 22 (August 2021): 12. www.techniumscience.com.
- M. Sahrul Fikri Samson, Daud Liando, and Alfon Kimbal. "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Penyusunan Daerah Inisiatif Di Kota Tidore Kepulauan." *Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/23914>.
- Mardialamsyah, Syamsir, and Meri Yarni. "Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pembentukan Daerah Periode 2019-2024." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 29–40.
- Maryanto, Sidik, Erwin Putubbasai, and Fajar Sasora. "Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Lampung Selatan." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 05, no. 01 (2022): 39–51.
- Milles, Matthew B, and Huberman. *Qualitative Data: A Sourcebook of New Method*. Translated by Tjejep Rohendi Rohidi. Vol. 17. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992.
- Moleong, Lexy J. "Metode Penelitian Kualitatif," 2012, xiv–410.
- Nurdin, Arifuddin. "Implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pembentukan Peraturan Daerah." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (May 17, 2020): 53–76. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.36>.
- "Peraturan DPRD No. 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD No. 2 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib..Pdf," n.d.
- PP No 12, Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (2018).
- Putra, R Dimas Widya, and Wilmar Salim. "Struktur Ruang Wilayah Gerbangkertosusila Berdasarkan Teori Pusat-Pinggiran: Sebuah Kajian." *Jurnal Tataloka* 24, no. 3 (2022): 186–201. <https://doi.org/10.14710/tataloka.24.3.186-201>.
- Rasjidi, M.Si, Prof. Dr. Ir Raihan. *Metodologi Penelitian*. Universitas Islam Jakarta, 2017. https://www.academia.edu/42283076/Metodologi_Penelitian.
- Rukhmana, Trisna, Danial Darwis, Dr. Abd. Rahman Alatas, Wico J Tarigan, Zulfin

- Rachma Mufidah, Muhamad Arifin, and Nur Cahyadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Rey Media Grafika, 2022.
- Subakti, Hani, Roberta Uron Hurit, Genoveva Dua Eni, Marianus Yufrinalis, Sonya Kristiani Maria, Rabiatus Adwiah, Ahmad Syamil, et al. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” edited by Syaiful Bahri, vi–202. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2023.
- Sudarsono, M Riban Satia, and M Yusuf. “Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Kajian Di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah).” *Pencerah Publik* 9, no. 2 (October 2022): 40–49. <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/pencerah>.
- Sugiman. “Fungsi Legislasi Dpr Pasca Amandemen Uud Nkri 1945.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10, no. 2 (2020): 173–82. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.468>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Waruwu, Marinu. “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2896–2910.
- Widiani, Helmi. “Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.” *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, no. 2 (May 12, 2021): 21–38. <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.184>.
- Yulianti, Intan. “Peran Fungsi Legislasi Dprd Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah.” *Repository.Ub.Ac.Id*, 2018. http://repository.ub.ac.id/166088/1/Intan_Yulianti.pdf.

LAMPIRAN PERTANYAAN KEPADA INFORMAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana DPRD menjalankan tugasnya dalam memenuhi fungsi legislasi?
3. Sejauh mana tingkat keberhasilan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi?
4. Apa saja peraturan daerah yang telah dibentuk oleh DPRD dalam masa jabatan Tahun 2019-2024?
5. Adakah prinsip atau acuan yang dijadikan sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
6. Apa saja landasan yang digunakan selama proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
7. Bagaimana masyarakat terlibat dalam pembentukan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?
8. Bagaimana koordinasi antara DPRD dan masyarakat selama pembentukan Ranperda?
9. Bagaimana upaya DPRD dalam mengawasi kondisi objek petani selama pembentukan?
10. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh DPRD selama mengawasi Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat?

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

1. Bagaimana kondisi yang terjadi pada Pertanian di Lamongan?

2. Sejauh mana yang diketahui tentang permasalahan yang dihadapi dalam mengelola Pertanian di Lamongan, khususnya oleh para petani?
3. Bagaimana kontribusi yang diberikan selama proses penyusunan dan pengawasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Lamongan?
4. Apa saja langkah kerja sama yang telah dilakukan untuk mendukung proses Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Lamongan?
5. Apa tantangan utama yang dihadapi ketika mengoptimalkan Pertanian di Lamongan?

Masyarakat

1. Apa saja kendala yang terjadi pada saat melakukan distribusi hasil tani?
2. Adakah pihak yang mempersulit Petani dalam memasarkan produk hasil tani?
3. Apakah Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dibuat sudah berpihak pada Petani?
4. Bagaimana perkembangan yang dirasakan setelah adanya Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani?

LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA DAN TEMUAN KEGIATAN



Penulis berfoto dengan Ketua Bapemperda, Bapak Saifuddin Zuhri .



Penulis berfoto dengan Staf Sekretariat DPRD, Bapak Galang Rambu Anarki, SH.



Penulis berfoto dengan Kepala Bidang Penyuluhan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ibu Anis Sugiharti, SE., MM.



Penulis berfoto dengan Pengawas Ahli Muda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Ibu Santi Hardiani, SP.



Penulis berfoto dengan Ketua Gabungan Kelompok Tani “Tawang Tani Abadi”, Bapak Sumarlim, S.Pd.



Penulis berfoto dengan Ketua Kelompok Tani “Sumber Lestari 2”, Bapak Toha.

LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG

Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023

NO.	JUDUL PERATURAN DAERAH	PENJELASAN/NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN DISIAPKAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sistem Kesehatan Daerah	DPRD	2023
2.	Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila	DPRD	2023
3.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPRD	2023
4.	Badan Permusyawaratan Desa	DPRD	2023
5.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2023	Pemerintah Daerah	2023
6.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024	Pemerintah Daerah	2023
7.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Pemerintah Daerah	2023

	Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025		
8.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan	Pemerintah Daerah	2023
9.	Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi	Pemerintah Daerah	2023
10.	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran	Pemerintah Daerah	2023
11.	Penyelenggaraan Jalan Daerah	Pemerintah Daerah	2023
12.	Penyelenggaraan Kepariwisata	Pemerintah Daerah	2023
13.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa	Pemerintah Daerah	2023
14.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045	Pemerintah Daerah	2023

Daftar Panitia Khusus III Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	UNSUR
1	2	3	4
I.	Koordinator	Drs. H. Darwoto, M.M.	FPDIP
II.	Ketua	Hj. Ning Darwati	FDIP
III.	Wakil Ketua I	Anshori, S.Sos.	FGERINDRA
IV.	Wakil Ketua I	Kaharudin, S.H.	FPNRI
V.	Sekretaris	Siti Maskamah Mursyid, S.E.	FPD
VI.	Anggota	Hj. Aslichah, S.Pd.	FPKB
		M. Burhanuddin, S.Sos.	FPKB
		Sri Setyowati	FPD
		Wiji, S.E.	FPAN
		H. M. Nurul Huda AS.	FPGOLKAR
		Budi Sulis Setiyo	FPNRI
		Sholihin, S.H.	FPDIP

Susunan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2024

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan	Nama
I.	Ketua	Saifuddin Zuhri
II.	Wakil Ketua	Moch. Arif Ansori
III.	Sekretaris Bukan Anggota	Drs. Aris Wibawa, M.M
IV.	Anggota	Fatin Sufairoh, S.Km
		Aslichah, S.Pd
		Yanuar Yudha Prasetya
		Dr. Sanditia Devis Saputra
		Sholihin, S.H
		Ratna Mutia Marhaeni, S.H., M.Kn
		Matlubur Rifa', S.Hi., M.Pd
		Abdul Azis
		Drs. H. Suhartono
		Hj. Dian Zudiana



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Basuki Rahmad Nomor 43 - 49, Lamongan, Jawa Timur 62216,
Telepon (0322) 317794 - 317798, Faksimile (0322) 321729, Pos-el setwan@lamongankab.go.id
Laman www.lamongankab.go.id

Lamongan, 19 Januari 2025

Nomor : 175/ ²¹ /413.050/2025
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
di -
SURABAYA

Memperhatikan surat Saudara tanggal 3 Januari 2025, Nomor: B-0137/Un.07/10/D/PP.00.9/01/2025, perihal Permohonan Izin Penelitian. Bersama ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama : MEGAFITRIA FARIDA AISHA
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Terhadap permohonan di atas kami **TERIMA** untuk melaksanakan Penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan mulai tanggal 14 Januari 2025 s/d 30 Januari 2025.

Demikian untuk menjadikan maklum dan disampaikan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LAMONGAN
Plt. Kepala Bagian Umum

Drs. PURWO HANDIYONO, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690408 199803 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Panglima Sudirman No. 96, Lamongan, Jawa Timur 62212,
Telepon(0322) 321027, Faksimile(0322) 321027, Pos-el dinkpp@lamongankab.go.id
Laman <http://www.lamongankab.go.id/dinkpp>

Lamongan, 13 Maret 2025

Nomor : 000.9.6.1/546 /413.119/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
di
SURABAYA

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya nomor B-509/Un.07/0/D/PP.00.9/0/25 tanggal 5 Maret 2025 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka bersama ini disampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Megafitria Farida Aisha
NIM : 0040121088
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Politik

dapat melaksanakan penelitian untuk skripsi yang berjudul "Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Lamongan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani" di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan

An. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kabupaten Lamongan
Pit. Sekretaris



Muhammad Bakhrudin Zuhri, S.P., M.M.A
Penata Tingkat II/III d
NIP 19750707 200902 1 001

KERAGAAN PENGURUS KELOMPOK TANI “SUMBER LESTARI 2”

E. NAMA PENGURUS

- Ketua : TOHA
- Sekretaris : LUDIRO PRAYONO
- Bendahara : MUALIM
- Seksi – Seksi :
 - ✓ Seksi Saprodi dan Alsintan : HERMONO
 - ✓ Seksi Pengairan : ABDUL ROZI
 - ✓ Seksi Pengendalian Hama / Penyakit : NONO SUPRIYANTO
 - ✓ Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil : YUNUS SETIAWAN

F. JUMLAH ANGGOTA : 150

G. ALAMAT KELOMPOK TANI

- Dusun : Deyo
- Desa : Tawangrejo
- Kecamatan : Turi

H. LUAS WILAYAH KELOMPOK TANI

- | | | | |
|--------------|---|-------|----|
| • Sawah | : | 92.04 | Ha |
| • Tegalan | : | 2 | Ha |
| • Pekarangan | : | 5 | Ha |
| • Lain-lain | : | 9 | Ha |

Demikian berita acara ini dibentuk secara musyawarah dan apabila ada tidak kesesuaian dapat disempurnakan di kemudian hari.

Tawangrejo, 28 Februari 2025

Mengetahui,

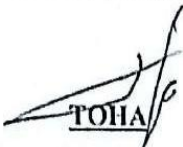
PPL Wilbin Turi V

Kepala Desa Tawangrejo

Ketua Poktan
“Sumber Lestari 2”

FAUZIYATUL IFFAH, S.Pt.




TOHA

**KERAGAAN PENGURUS
GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)
“TAWANG TANI ABADI “**

A. NAMA PENGURUS

- Ketua : SUMARLIM, S.Pd
- Sekretaris : ZUDI LUTFILLAH
- Bendahara : ALI SHODIKIN
- Seksi – Seksi :
 - ✓ Seksi Saprodi dan Alsintan : ABD. GHOFAR
 - ✓ Seksi Pengairan : LUDIRO PRAYONO
 - ✓ Seksi Pengendalian Hama / Penyakit : DWIYANTO
 - ✓ Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil : HERMONO

B. ALAMAT KELOMPOK TANI

- Alamat : Desa Tawangrejo, Kecamatan Turi

C. NAMA ANGGOTA GAPOKTAN

1. Kelompok Tani : SUMBER LESTARI 1
2. Kelompok Tani : SUMBER LESTARI 2
3. Kelompok Tani : SUMBER LESTARI 3

D. LUAS WILAYAH GAPOKTAN

- Sawah : 311,73 Ha
- Tegalan : 5 Ha
- Pekarangan : 13 Ha
- Lain-lain : 21,27 Ha

Tawangrejo, 28 Februari 2025

PPL Wilbin Turi V

FAUZIYATUL IFFAH, S.Pt.



Ketua GAPOKTAN
“TAWANG TANI ABADI “

SUMARLIM, S.Pd